

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode pertama tahun 2003-2008, secara umum telah menciptakan kerangka dasar bagi pengembangan pembangunan daerah tahap selanjutnya. Hasil pembangunan pada periode pertama telah mampu mendorong meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang antara lain terlihat dalam indikator pembangunan bidang sosial dan budaya, keagamaan, ekonomi, infrastruktur sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, partisipatif dan akuntabel.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palopo periode tahun 2008-2013, maka gambaran mengenai kondisi indikator pembangunan daerah pada tahun 2006-2007, menjadi tahun dasar perencanaan sebagai titik awal perencanaan pembangunan daerah yang akan dikembangkan lima tahun ke depan. Kondisi umum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Gambaran Geografis

Secara geografis Kota Palopo terletak pada koordinat $2^{\circ}53^{\circ}15^{\circ}$ - $3^{\circ}04^{\circ}08^{\circ}$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03^{\circ}10^{\circ}$ - $120^{\circ}14^{\circ}34^{\circ}$ Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 247,52 Km², atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja

Kondisi geografis Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan bentangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas wilayah Kota Palopo adalah merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, 24,76% terletak pada ketinggian 501-1.000 m dan 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m

Letak geografis Kota Palopo merupakan posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat trans Sulawesi dan laut trans Teluk Bone. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah satu jalur distribusi barang dari Makassar dan Pare-Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan pada jalur laut menuju Propinsi Sulawesi Tenggara. Keberadaan fasilitas seperti Bandara Udara Lagaligo yang terletak di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang terletak sekitar 20 km dari Kota Palopo yang secara tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap posisi strategis wilayah Kota Palopo sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya terhadap wilayah hinterland lainnya. Dari posisi geografis tersebut, maka paling tidak Kota Palopo akan dapat berperan :

- a. Secara Wilayah, sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan kawasan andalan bagian utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung hinterland yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan)
- b. Secara Regional, Kota Palopo sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Pare-Pare, Watangpone, dan Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju, Majene
- c. Secara Nasional, Kota Palopo merupakan salah satu titik sentral wilayah nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya penumpang, barang dan jasa ke Kota-Kota di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya.

B. Gambaran umum kondisi demografi daerah

Penduduk Kota Palopo pada tahun 2006 berjumlah 133.990 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 66.217 jiwa dan perempuan sebanyak 67.773 jiwa dengan demikian sex ratio sebesar 98, yang menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan maka terdapat 98 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,5 %/tahun, pertumbuhan penduduk Kota Palopo lebih banyak disebabkan oleh tingginya mutasi penduduk masuk sebagai dampak dari tersedianya daya tarik penduduk antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan terciptanya peluang investasi pada berbagai sektor.

Kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai 541 jiwa/km, yang tersebar ke dalam 9 (sembilan) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) Kelurahan. Distribusi tingkat kepadatan penduduk tidak merata dimana terdapat tiga Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa /km², yaitu Kecamatan Wara dengan tingkat kepadatan tertinggi 1.967 jiwa / km², Kecamatan Wara Timur dengan kepadatan 1.931 jiwa/km² dan Kecamatan wara Utara dengan kepadatan 1.607 jiwa/km. Terdapat 2 (dua) Kecamatan dengan tingkat kepadatan sedang yakni Kecamatan Wara Selatan dengan tingkat kepadatan 973 jiwa/km² dan Kecamatan Bara dengan kepadatan 871 jiwa/km², sedangkan 4 (empat) Kecamatan lainnya memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah yakni Kecamatan Telluwanua dengan kepadatan 392 jiwa/km², Kecamatan Sendana dengan kepadatan 207 jiwa/km², Kecamatan Wara Barat dengan kepadatan 178 jiwa/km² dan Kecamatan Mungkajang dengan kepadatan 173 jiwa/km².

Komposisi penduduk Kota Palopo berdasarkan struktur usia menunjukkan bahwa struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yakni yang berusia antara 15-64 tahun 61,77%, kelompok usia 0-14 tahun 33,02% dan kelompok usia 65 tahun keatas 3,88 %, dengan demikian penduduk usia non produktif mencapai 36,91% hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan mencapai 36,91% yang berarti bahwa dari setiap seratus penduduk usia produktif (15-64 tahun) rata-rata menanggung atau terbebani antara 36-37 orang penduduk usia non produktif

Penduduk berdasarkan usia kerja dapat digambarkan bahwa pada tahun 2006 penduduk yang berusia 10 tahun ke atas sebagai angkatan kerja atau yang sedang mencari kerja berjumlah 3.683 orang terdiri dari 1.733 orang laki-laki dan 1.950 orang perempuan dan berhasil ditempatkan berjumlah 739 orang. Potensi pencari kerja yang berhasil ditempatkan tersebut dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan terdiri dari 35,18 % berpendidikan Sarjana, 23,14% berpendidikan SMA-Diploma, selebihnya berpendidikan SD-SMA

Penduduk Kota Palopo tahun 2006 yang berusia 10 tahun ke atas berjumlah 105.647 jiwa dengan aktivitas utama yang dilaksanakan yaitu 39,82% bekerja, 11,10%

menganggur, 20,34% sedang bersekolah, dan 20,35 % mengurus rumah tangga, serta pada kegiatan lain-lain 8,39%. Dari 39,82% atau sekitar 42.000 orang yang bekerja tersebut tersebar ke dalam berbagai sektor lapangan kerja yakni di sektor pertanian (31%), sektor industri (4,9%), sektor perdagangan hotel dan restoran (21,3.%), sektor angkutan dan komunikasi (10,1%), sektor jasa (26,7%) dan lainnya 2.326 jiwa (5,8%) dengan demikian terlihat tiga lapangan usaha pokok penduduk di Kota Palopo yakni sektor pertanian, jasa, dan perdagangan Hotel dan restoran,

C. Gambaran Umum Kondisi Ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dalam kurun waktu 2003-2007 menunjukkan trend data yang relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7 % pertahun yang dapat digambarkan dalam tabel

Tabel : 2
PDRB Harga Konstan KOTA PALOPO 2003-2007

No	Tahun	PDRB (juta)	pertumbuhan
1	2004	609.767,41	7,37
2	2005	656.854,91	7,72
3	2006	698.368,48	6,32
4	2007	743.974,17	6,53
Rata-rata			7

Sumber : PDRB Kota Palopo 2007

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2005 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7,72%, namun pertumbuhan pada tahun 2007 cenderung menurun hingga mencapai 6,53%. Trend penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan data selama lima tahun cukup dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, sehingga pertumbuhan beberapa sektor melambat seperti sektor perdagangan, Hotel dan restouran, angkutan dan komunikasi serta sektor bangunan.

Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, namun pertumbuhan tersebut paling tidak telah memberikan peningkatan pada nilai PDRB sehingga nilai PDRB Kota Palopo pada tahun 2007 telah mencapai Rp. 1.157.385,81 juta dengan rata-

rata pertumbuhan setiap tahun mencapai 13,83% pertahun, jika dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Selatan maka kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan telah mencapai 1,7%. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palopo pada tahun 2007 telah mencapai 7,6 juta/kapita

Perkembangan sektor-sektor ekonomi berdasarkan data kontribusi sektor-sektor terhadap nilai PDRB selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa secara pelan telah terjadi pergeseran struktur ekonomi Kota Palopo dimana sektor pertanian secara signifikan mengalami penurunan sehingga kontribusi sektor pertanian pada tahun 2007 mencapai 33,52% dibandingkan dengan keadaan tahun 2005 dengan kontribusi 38,54%. Di sisi lain beberapa sektor seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, Jasa-jasa, Keuangan secara signifikan mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada sektor pertanian beberapa sub sektor justru mengalami peningkatan yang signifikan khususnya sub sektor perikanan dan kelautan yang didorong oleh meningkatnya produksi rumput laut cattonic dan glacialaria yang banyak memperoleh permintaan dari luar daerah. Dengan demikian struktur perekonomian Kota Palopo ditopang oleh tiga sektor terbesar yakni sektor pertanian 33,52%, Perdagangan, hotel dan restoran 18,03 % dan Jasa-jasa 12,97 %, Perkembangan prosentase kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel : 3
Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2005-2007

N0	Lapangan Usaha	2005	2006	2007
1	Pertanian	38,54	36,37	33,52
2	Pertambangan & Penggalian	0,18	0,19	0,17
3	Industri Pengolahan	4,33	4,41	4,33
4	Listrik dan air bersih	1,54	1,68	1,74
5	Bangunan	6,68	7,26	8,06
6	Perdagangan,Hotel dan restoran	16,98	17,12	18,03
7	Angkutan dan Komunikasi	10,46	10,12	9,99
8	Keuangan,Persewaan	9,81	10,38	11,19
9	Jasa-jasa	11,30	12,46	12,97
	PDRB	100	100	100

Sumber : PDRB Kota Palopo Tahun 2007

Menurunnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah meskipun masih merupakan sektor dengan kontribusi terbesar, sejalan dengan semakin berkurangnya potensi lahan pengembangan pertanian, dapat diuraikan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2006, dari luas wilayah Kota Palopo 247,52 km², prosentase penggunaan lahan adalah 11,85% lahan sawah dan 88,15% lahan bukan sawah termasuk didalamnya adalah bangunan perumahan, perkantoran, lapangan, hutan, jalan, pekuburan dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan kebutuhan kota yang semakin pesat maka kebutuhan akan permukiman, perkantoran dan sebagainya akan semakin meningkat sehingga akan semakin mengurangi luas lahan sawah. Pengembangan sektor pertanian di Kota Palopo didukung dengan potensi lahan pertanian saat ini seluas 24.752 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 3.011 ha, tegal / kebun seluas 1.319 ha, pekarangan seluas 4.309, hutan rakyat seluas 1.203 ha, hutan negara seluas 6.401 ha, perkebunan seluas 1.954 ha dan rawa-rawa seluas - ha, didukung dengan fasilitas infrastruktur irigasi teknis untuk pengembangan lahan persawahan, juga didukung oleh potensi unggulan lainnya seperti sub sektor perikanan dan kelautan, memiliki potensi yang sangat besar. Pengelolaan potensi sub sektor perikanan di dukung dengan sarana dan prasarana 1 (satu) unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap sebagai dermaga berlabuhnya kapal – kapal nelayan setiap hari, Hasil tangkapan nelayan memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 hasil tangkapan memperlihatkan nilai 1.946,82 Ton dan pada tahun 2007 sebanyak 2.002,87 Ton. Kenaikan hasil tangkapan tersebut juga ditunjang adanya peningkatan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan, yaitu pada tahun 2007 alat tangkap beroperasi sebanyak 801 unit terdiri dari 178 unit Kapal Motor, 465 unit Motor Tempel dan 158 unit Perahu tanpa motor. Sedangkan luas areal budidaya perikanan menurut kecamatan di Kota Palopo tahun 2007 berjumlah 1.734.00 dengan rincian sebagai berikut jumlah Tambak 1.566,50, jumlah Kolam 35,50 dan jumlah Sawah 146. Pada sub sektor perkebunan, potensi sub sektor perkebunan terdiri dari potensi tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan luas areal 7.279,49 Ha dengan produksi 3.024,26 Ton dengan jumlah Petani 8.253 orang

Potensi ekonomi kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan Jasa. Potensi ini didukung oleh berkembangnya unit usaha perdagangan, dan industri yang berskala

kecil dan menengah. Jumlah usaha industri pada tahun 2007 tercatat 270 unit usaha dengan perincian sebagai berikut Perusahaan Kecil sebanyak 264 unit usaha yang menyerap tenaga kerja 1.227 orang dengan jumlah modal usaha Rp. 11.767.088.000, Usaha industri Menengah sebanyak 5 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 41 orang dengan modal usaha Rp. 1.590.000.000, dan Perusahaan Besar sebanyak 1 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 20 orang dengan modal usaha sebanyak Rp. 600.000.000,- Sedangkan perkembangan sektor perdagangan dari tahun 2003 sampai tahun 2007 yaitu 316 unit usaha menjadi 2.391 unit usaha dengan perincian sebagai berikut Usaha Dagang Kecil Mikro sebanyak 2.202 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 7.963 orang dengan modal usaha sebanyak Rp. 138.100.464.000,-, Usaha Dagang Menengah sebanyak 158 usaha dengan jumlah tenaga kerja 1.261 orang dengan modal usaha sebanyak Rp. 55.233.458.000,- sedangkan Usaha Dagang Besar sebanyak 31 usaha, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 505 orang dengan modal usaha sebanyak Rp. 236.241.484.000,-

Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional dan daerah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik terlihat dari peningkatan jumlah anggota dan karyawan Koperasi, sampai tahun 2007, jumlah anggota unit Koperasi di Kota Palopo berjumlah 219 unit dengan anggota mencapai 12.896 orang dan 599 orang karyawan. Kapasitas Modal Koperasi di Kota Palopo tahun 2007 mencapai 5,4 Milyar lebih dengan volume usaha mencapai Rp.26,7 Milyar lebih sehingga Sisa Hasil Usaha Koperasi mencapai Rp.1,8 M,

Iklim investasi Kota Palopo berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2003-2005 menunjukkan kemajuan cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan 5,52 %, investasi yang paling menonjol adalah investasi jangka menengah dan panjang terutama pada sektor angkutan dan komunikasi. Berkembangnya investasi pada sektor angkutan dan komunikasi dari rata-rata kontribusi mencapai 26,2%.

D. Gambaran umum kondisi sosial dan budaya

Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Palopo mayoritas beragama Islam, Agama islam sebagai agama mayoritas penduduk pada tahun 2006 memiliki rumah ibadah mencapai 155 unit, gereja 57 unit, pura 2 unit, dan vihara 2 unit. Suasana hubungan dalam kehidupan beragama telah tercipta suasana yang harmonis antara pemeluk agama sebagai wujud pelaksanaan program-program dalam **Dimensi Religi**. Dalam rangka menciptakan dan mempertahankan suasana yang kondusif dan hubungan harmonis diantara pemeluk agama, maka Pemerintah Kota Palopo telah membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Muspida Kota Palopo sebagaimana terealisasi melalui Pembentukan Forum Komunikasi Masalah Aktualisasi yang melibatkan semua unsur Muspida dan Unit Kerja terkait, berdasarkan SK. Walikota Palopo Nomor : 163/III/2006 tanggal 18 Maret 2006.

FKAUB (Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama) dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Sejak terbentuknya Forum ini, secara rutin menggelar pertemuan berkala setiap dua bulan sekali

Kondisi kemandirian dan ketertiban masyarakat sebagai kondisi mutlak bagi berlangsungnya seluruh aktifitas di suatu wilayah, baik aktifitas sosial, budaya, ekonomi maupun aktifitas keagamaan. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, kondisi keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kota Palopo relatif terjamin dengan aman dan tenteram. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada Walikota Palopo tahun 2008, berkurangnya kejadian berupa gangguan keamanan dan ketertiban umum yang berdampak luas. Dari data Kepolisian tercatat jumlah kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran lalu lintas (traffic Offence)

Untuk mendeteksi gejala gangguan ancaman maka Pemerintah Kota Palopo telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Latihan Pendataan dan Pelaporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim KAMTIBMAS pada sembilan Kecamatan yang melibatkan semua unsur komponen masyarakat. Pada tahun Anggaran 2007 akan dilanjutkan dengan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan Sosialisasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat telah berkembang dimana data Indeks Kesehatan yang merepresentasikan derajat kesehatan masyarakat telah berkembang dengan baik, Angka Harapan Hidup waktu lahir tahun 2006 sudah mencapai 70,4 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup rata-rata Sulawesi Selatan hanya 68,92 tahun. Hal tersebut sejalan dengan terciptanya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Jika dilihat dari prosentase rumah berdasarkan rumah sehat pada tahun 2006, terlihat bahwa dari 17.775 rumah yang disurvei terdapat 11.517 atau 64,79 % rumah tergolong rumah sehat, prosentase rumah sehat tertinggi terdapat di Kecamatan Wara dengan tingkat 77,09 % dimana dari 7.100 rumah yang disurvei terdapat 5.481 rumah sehat, Kecamatan Bara sebesar 77,06 % yakni dari 632 rumah yang disurvei terdapat 487 rumah sehat, sedangkan di Kecamatan Wara Selatan sebesar 70,26 %, dimana dari 1.293 rumah yang disurvei terdapat 912 yang sehat, sedangkan prosentase terendah terdapat di Kecamatan Telluwanua di mana dari 996 rumah yang diperiksa terdapat 328 (32,96%) tergolong sehat, di Kecamatan Bara dari 632 rumah yang diperiksa terdapat 487 (77%) tergolong rumah sehat, di Kecamatan Wara Utara dari 5.113 rumah yang diperiksa terdapat 2.672 (52,3 %) tergolong rumah sehat,

Perilaku rumah tangga hidup bersih dan sehat sebagai gambaran tingkat kepedulian dan kesadaran rumah tangga terhadap hidup bersih dan sehat menunjukkan jumlah 55,13 %, dimana dari 4.977 rumah tangga yang disurvei terdapat 2.744 yang berperilaku hidup

sehat dan bersih, Kecamatan dengan tingkat berperilaku hidup sehat yang tinggi terdapat di Kecamatan Bara sebesar 69,63% dimana dari 978 rumah tangga yang dipantau terdapat 681 berperilaku bersih dan sehat, kemudia di Kecamatan Wara Utara sebesar 61,70 %, Kedcamatan Wara sebesar 57,8%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Telluwanua sebesar 26,82 %

Keselamatan bayi sebagai salah satu indikator pelayanan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga pada tahun 2006 mencapai 1,28 / 1000 dari 2.348 kelahiran, hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan sebagaimana terlihat bahwa pada tahun 2006 dari 2.348 persalinan, yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.299 kasus (97,91 %). Kondisi ini sejalan dengan tersedianya akses sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang pada tahun 2007 sarana dan prasarana kesehatan terdiri dari 7 unit Puskesmas, 3 unit Rumah Sakit Umum, 1 unit Rumah sakit tipe B yang saat ini dalam tahap penyelesaian, 2 unit Rumah Bersalin dan 1 Klinik dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya sekitar 327 orang.

Berdasarkan kemajuan dalam indikator kesehatan tersebut sehingga Pemerintah Pusat menganugerahkan Piala Manggala Bhakti Husada, Kesatria Bhakti Husada, serta Piala Kota Sehat Swasti Saba.

Untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar, maka penduduk miskin diberikan jaminan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2006 berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin penerima Asuransi Kesehatan Miskin sebanyak 46.402 jiwa atau 36 % dari jumlah penduduk 127.804 jiwa, dengan persebaran yang tidak merata. Kecamatan Wara Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yakni 8.391 jiwa atau sekitar 7 %, Kecamatan Wara sebanyak 7.459 jiwa atau sekitar 6 %, Kecamatan Telluwanua sebanyak 7.084 atau sekitar 6 %, Kecamatan Wara Utara sebanyak 4.700 jiwa atau sekitar 4 % dan yang terendah di kecamatan Wara Selatan sebanyak 2.742 jiwa.

Dalam bidang pendidikan, akses masyarakat terhadap pendidikan semakin terbuka, kebijakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) pada semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2004-2007, telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan terlihat pada perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan telah mencapai standar nasional, APK Sekolah Dasar (SD) tahun 2006 sebesar 104 % dan menjadi 117,2 pada tahun 2007, APK SMP pada tahun 2006 sebesar 91,36 dan menjadi 112,7 % tahun 2007, dan APK SMA tahun 2006 sebesar 77,2 %, menjadi 95,6 % tahun 2007, hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kota Palopo telah berada di atas rata-rata standar nasional. Begitu pula pada kemampuan membaca masyarakat, dimana Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya) pada 2006 mencapai 92,3 persen.

Dilihat dari aspek mutu pendidikan terutama jika dilihat dari tingkat kelulusan pada tahun 2007, terlihat terjadinya penurunan tingkat kelulusan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, penurunan tingkat kelulusan tersebut menjadi indikasi menurunnya kualitas pengajaran pada tingkat SMP dan SMA, namun demikian tingkat kelulusan siswa pada Perguruan Tinggi Negeri baik di PTN di Sul Sel maupun PTN di luar Sul Sel mengalami peningkatan dari 446 orang di tahun 2006 menjadi 558 orang di tahun 2007.

Penduduk dengan jumlah yang besar selain menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan terutama jika komposisi struktur usia penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif sebagai angkatan kerja, juga akan menjadi salah satu tantangan untuk menyediakan kesempatan kerja. Potensi angkatan kerja didasarkan pada tingkatan usia, sesuai ketentuan ketenagakerjaan bahwa angkatan yang termasuk produktif berada pada usia 15-64 tahun, non produktif antara 0-15 tahun dan 64 tahun ke atas. Tersedianya angkatan kerja produktif merupakan modal dasar untuk mengembangkan potensi wilayah terutama untuk mendukung sektor-sektor pembangunan. Berdasarkan data BPS,

penduduk usia kerja di Kota Palopo pada tahun 2007 berjumlah 86.473 jiwa atau sekitar 62,85 % dari jumlah penduduk, dari jumlah tersebut angkatan kerja mencapai 75.792 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,46%/tahun, angkatan kerja yang bekerja mencapai 51.145 jiwa atau 67,64% sedangkan angkatan kerja yang menganggur mencapai 23.727 jiwa atau 31,47%

Pembangunan dibidang Pariwisata dan Budaya perlu mendapat perhatian sehubungan meningkatnya permintaan pemenuhan kebutuhan akan hiburan, peristirahatan dan rekreasi baik lokal, domestik maupun wisatawan mancanegara. Meningkatnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat mengakibatkan kecenderungan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder semakin meningkat. Pembangunan disektor kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pendapatan penduduk, disamping memperkenalkan dan melestarikan budaya setempat serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar. Sampai dengan tahun 2007, potensi wisata dan potensi budaya yang telah di jadikan sebagai salah satu objek wisata antara lain, Kawasan Objek Wisata Labombo, Kawasan Objek Wisata Latuppa.

Jumlah wisatawan asing di Kota Palopo dari tahun 2004 – 2006 mencapai 1003 orang dan wisatawan domestic sebanya 47.716 orang. Peningkatan jumlah wisatawan asing diakibatkan oleh telah ditetapkannya Pelabuhan Tanjung Ringgit menjadi salah satu pelabuhan tujuan dari rute kapal pesiar wisata . Oleh karena itu Pemerintah Kota Palopo berupaya untuk membenahi sejumlah objek wisata yang ada di Kota Palopo sebagai alternatif bagi wisatawan sebelum atau setelah kembali dari DTW Tana Toraja

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari data keluarga berdasarkan hasil pentahapan keluarga sejahtera. Pada tahun 2006 jumlah keluarga di Kota Palopo 26.168 keluarga dengan hasil pentahapan keluarga prasejahtera 6.714 keluarga atau 23,8%, keluarga sejahtera I dan II berjumlah 12.999 keluarga atau 46,14% dan keluarga sejahtera III dan III plus berjumlah 8.455 keluarga atau 30,0%

E. Gambaran Kondisi Umum Pemerintahan Daerah

Pelayanan pemerintahan Kota Palopo dalam tahun 2007, mengalami peningkatan yang cukup pesat, terlihat dari responsifitas pemerintah terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan efesiensi pelayanan umum pemerintahan, sehingga pada tahun 2006 administrasi pemerintahan dimekarkan dari 4 Kecamatan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan dan dari 28 Kelurahan menjadi 48 (empat puluh delapan) Kelurahan 693 RT, 240 RW, Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Palopo juga pada tahun 2007 telah melakukan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Palopo sebagai upaya untuk memantapkan pelayanan dan menunjang Visi Kota Palopo Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terbaik di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, maka saat ini unit kerja Pemerintah Kota Palopo terdiri dari 3 Sekertariat, 7 Badan, 16 Dinas, 4 Kantor dan 1 Inspektorat, dengan dukungan aparatur sumber daya manusia berdasarkan golongan kepangkatan tahun 2008 berjumlah 4.474 orang terdiri dari 33 orang golongan I, 1.267 orang golongan II, 1.948 orang golongan III, dan 1.126 orang golongan IV. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan PNS Kota Palopo terdiri dari 82 orang Strata Dua, 1.847 orang strata satu, 846 Diploma I-III, 1.492 orang SMA, 49 orang SMP, dan 158 orang SD

F. Gambaran Umum Inprastruktur Sarana dan Prasarana daerah

Kota merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat yang ditunjang dengan sarana perdagangan, transportasi dan komunikasi. Tersedianya sarana dan prasarana inprastruktur perkotaan merupakan faktor utama dalam menunjang perkembangan dan pengelolaan perkotaan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saat ini kondisi sarana dan prasarana wilayah di Kota Palopo secara umum telah tersedia cukup untuk mendukung aksesibilitas wilayah dan aktivitas utama masyarakat kota, hal dapat digambarkan dari kondisi panjang jalan di Kota Palopo.

Pada tahun 2007 panjang jalan keseluruhan di Kota Palopo kurang lebih 290,161 km, yang terdiri dari jalan aspal 214,125 KM, jalan kerikil 72,408 Km, jalan tanah 3,628 km.

Kondisi ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur jalan yang telah terbangun selama lima tahun terakhir. Jika dibandingkan keadaan panjang jalan pada tahun 2003 dimana panjang jalan 204,468 km terdiri dari jalan aspal 149,66 km, jalan kerikil 24,36 km, jalan tanah 30,45 km. Peningkatan kualitas jalan dari jalan beraspal yakni dari panjang 149,659 km jalan beraspal pada tahun 2003 menjadi 214,125 km pada tahun 2007 atau bertambah 64,5 km. Sarana perhubungan lainnya adalah Infrastruktur jembatan untuk meningkatkan akses wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat Kota Palopo saat ini berjumlah 150 unit jembatan dengan panjang keseluruhan kurang lebih 111.696 meter, baja 1 (unit) jembatan beton, jembatan kayu dan gantung dan jembatan darurat. Fasilitas untuk menunjang akses wilayah, berupa fasilitas perhubungan daerah dan antar daerah telah tersedia yakni Terminal angkutan darat 1 Unit dan berbagai fasilitasnya serta Infrastruktur pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit

Drainase / saluran air limbah tahun 2007 sudah terbangun sekitar 20.557 m yang terdiri dari saluran primer kurang lebih 2.933 meter, saluran sekunder kurang lebih 8.460 meter dan saluran tersier 9.160 meter, dengan keadaan tersebut sehingga secara efektif dapat mengurangi frekuensi terjadinya genangan air pada waktu musim hujan. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 dimana secara umum kondisi drainase yang ada nampaknya belum memenuhi suatu standar perencanaan teknis, hal ini terlihat dengan adanya saluran-saluran yang tidak jelas arah pengaliran maupun pembuangannya, serta belum ada saluran yang telah sampai pada saluran akhir “out fall” (sungai atau laut), disamping pada umumnya drainase sudah mengalami pendangkalan (sedimentasi) dan ditumbuhi oleh jenis rumput tertentu baik pada saluran primer, sekunder, dan tersier, sehingga dilakukan pengembangan sistem jaringan drainase yang lebih sesuai dengan struktur pembuangan yang dapat lebih cepat mengalirkan air ke pembuangan akhir.

Infrastruktur pengairan untuk menunjang aktivitas pertanian, telah tersedia infrastruktur sepanjang 7.177 m, pengairan Teknis sepanjang kurang lebih 6.148 meter dan pengairan non teknis sepanjang 1.029 Meter. Sedangkan untuk melayani kebutuhan air bersih pedesaan telah terbangun sarana air bersih berupa sumbur bor dan bak penampungan air bersih sebanyak 71 unit tersebar 48 Kelurahan yang secara langsung dapat membantu

kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pelayanan air bersih diperkotaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo telah melayani pelanggan kurang lebih 13.779 pelanggan

Dalam bidang lingkungan hidup, keberhasilan Pemerintah Kota Palopo dalam meraih Piala Adipura sebagai penghargaan tertinggi pemerintah dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup, menjadi pengakuan majunya pembangunan dalam bidang lingkungan hidup. Komitmen Pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan lingkungan hidup terlihat dari dibentuknya Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo pada tahun 2006 sebagai Badan yang bertugas melaksanakan pelayanan terhadap fungsi lingkungan hidup. Kualitas infrastruktur sangat mempengaruhi kinerja ekonomi masyarakat, semakin memadai infrastruktur suatu wilayah semakin besar dukungan yang diberikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.